



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN
KETUA KPK DAN KEPALA PPAK REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 07 Juni 2023
Waktu	:	14.00 s.d 16.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III Gedung Nusantara II Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta
Ketua Rapat	:	1. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.
Acara	:	Membahas RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2024.
Sekretaris Rapat	:	Novianti, S.E./Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	:	Anggota DPR RI: 28 dari 53 Anggota Komisi III

PIMPINAN : 1 dari 5 Pimpinan

1. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. /Wakil Ketua/ F-PG);
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. (Wakil Ketua /F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 Anggota dari 11 Anggota:

1. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
2. Drs. Nurdin, M.M.
3. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.L.M.
4. Johan Budi Sapto Pribowo
5. I Wayan Sudirta, S.H.
6. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
7. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.

2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
3. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
5. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 Anggota dari 7 Anggota:

1. Muhammad Rahul
2. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.
3. Bimantoro Wiyono, S.H.
4. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 Anggota dari 5 Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Y. Jacky Uli

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 Anggota dari 5 anggota:

-

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota:

1. Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
Accs.
2. H. Santoso, S.H., M.H.
3. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 Anggota dari 4 Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E
2. H.M. Nasir Djamil, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 Anggota dari 3 Anggota:

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

UNDANGAN:

1. Ketua KPK (Firli Bahuri) beserta jajaran;
2. Kepala KPK (Ivan Yustiavandana) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr.Ir.H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./WAKIL KETUA/ F-PG):

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Skors kami cabut dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan jajarannya,
Yang terhormat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan beserta jajaran, serta
Hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa hadir melaksanakan konstitusi anggaran dengan KPK dan PPATK dalam keadaan sehat wal afiattanpa kurang suatu apapun.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua KPK beserta jajaran dan juga Kepala PPATK beserta seluruh jajarannya atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Selanjutnya, perkenalkan Pimpinan menyampaikan agenda rapat kerja kita hari ini, yaitu pembahasan RKA..., apa..., RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2024, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup.

Kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita saat ini pukul 14 Lebih 25 menit dan dapat kita akhiri pada pukul 15.30, paling lambat pukul 16. Enam belas ya?

(RAPAT: SETUJU)

(RAPA DIBUKA PUKUL 14.00 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf c Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. atas dasar Pasal 59 ayat (2) huruf c tersebut dan siklus anggaran yang diberikan oleh Badan Anggaran DPR RI maka Komisi III DPR RI menjadwalkan kegiatan Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2024 terhadap minta kerja dimulai dari 31 Mei sampai dengan 9 Juni 2023.

Berdasarkan data yang kami dapat bahwa Pagu Indikatif Tahun 2024 KPK RI sebesar Rp1.095.749.163.000,00 dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp249.668.818.000,00.

Yang kedua, Pagu Indikatif Tahun 2024 PPATK, Pagu Indikatif Tahun 2024 PPATK sebesar Rp242.325.421.000,00 dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp84.383.423.000,00.

Komisi III ingin mengetahui akan digunakan untuk program dan kegiatan apa saja anggaran tahun 2024 tersebut. Untuk itu maka kami persilakan kepada saudara Ketua KPK dan nanti dilanjutkan oleh Kepala PPATK untuk menyampaikan penjelasan mengenai pagu anggaran tahun 2024 beserta usulan tambahannya.

Kami persilakan Saudara Ketua KPK untuk menyampaikan paparannya.

KETUA KPK (FIRLI BAHURI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Shalom,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III DPR RI,
Rekan-rekan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati, yang saya banggakan.

Pertama, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah dijadwalkan oleh Komisi III dan saya harus merubah jadwal yang seharusnya siang ini saya sudah berada di Ambon karena kecintaan dan kepedulian serta panggilan tugas maka saya harus menyempatkan diri ke sini dan mengatur jadwal saya ke Ambon.

Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi III kepada KPK, lebih khusus lagi terkait dengan pembahasan anggaran rencana kerja anggaran dan kementerian/lembaga, lebih khususnya adalah untuk KPK.

Berikutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan agenda yang harus kami sampaikan hari ini. Namun, sebelumnya kami ingin menyampaikan juga, sebelum kami memasuki rencana anggaran tahun 2024 maka kami harus menyampaikan bagaimana tahun lalu 2022, bagaimana juga tahun ini 2023, segenap tantangan dan hambatannya. Begitu juga perkiraan ancaman dan panggilan tugas KPK

dengan melaksanakan tugas pokok KPK sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang 19 2019 di tahun 2024.

Untuk itu, kami akan sampaikan secara perlahan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi informasi yang lengkap untuk Komisi III dalam rangka mengabulkan permohonan kami, yang tadi disampaikan oleh pimpinan Komisi III terkait dengan Pagu Anggaran 2004, 2024 dan usulan tambahan anggaran KPK 2024.

Yang pertama, kami ingin kembali mengingatkan karena tanggal 9 Februari 2023 yang lalu kita sudah pernah rapat kerja dengan tiga bahasan: yang pertama, Komisi III telah menerima penjelasan kepada Pimpinan KPK terkait dengan kinerja tahun 2022 dan juga mendukung rencana kerja tahun 2023. Itu sudah kami laksanakan.

Yang kedua adalah Komisi III juga ingin dan meminta kepada KPK untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara simultan serta pelaksanaan *monitoring* guna menyelamatkan keuangan negara. Ini kami akan laporkan selanjutnya.

Yang ketiga, Komisi III meminta KPK untuk meningkatkan pemantauan dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk peningkatan efektivitas penanganan perkara korupsi. Kami akan laporkan dulu terkait dengan tindak lanjut hasil kesepakatan di dalam rapat kerja pada tanggal 9 Februari 2023 yang lalu.

Terkait dengan koordinasi dan supervise, KPK telah melaksanakan kegiatan koordinasi antar kementerian/lembaga yang kita laksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 yang lalu. Hadir seluruh gubernur, hadir seluruh bupati dan wali kota, termasuk juga sekretariat jendral, maupun inspektorat jenderal dan inspektur masing-masing kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Yang kedua, kami juga menyampaikan bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dengan salah satu upaya adalah pencegahan korupsi di daerah karena dari data yang kita catat bahwa korupsi memang bisa terjadi dan tersebar di seluruh daerah.

Yang ketiga, KPK juga melakukan tanda tangan dalam rangka efektifitas, efisiensi, kolaborasi, sinergi dengan aparat penegak hukum. Kini melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja dengan Kejaksaan. Itu pun sudah kami laksanakan.

Yang selanjutnya, di dalam upaya peningkatan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana amanat Undang-Undang 19/2019 di Pasal 6 huruf d bahwa KPK melaksanakan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantas korupsi. Karena itu, KPK pada tahun 2023 ini melakukan 49 supervisi terhadap penanganan perkara. Sembilan di antaranya sudah selesai. Empat puluh sembilan perkara ini merupakan perkara *carry over* dari tahun 2022 karena kaitan laporkan terdahulu, dari 88 perkara tindak pidana korupsi yang disupervisi oleh KPK,

kami selesaikan 39 perkara di tahun 2022 dan 49 kita harus selesaikan di tahun 2023.

Bapak-Bapak yang kami hormati, serta Ibu-Ibu Anggota Komisi III DPR yang kami hormati.

Di dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, KPK juga telah melakukan salah satu ... (*suara tidak jelas 12:57*) pendidikan anti korupsi dan ini sudah kami laksanakan reratanya di atas dari para target.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan kegiatan di tahun 2023. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK di dalam ulasan tugasnya tidak lepas dari program prioritas nasional. Ada tujuh program prioritas nasional. Di antara 7 tersebut, ada 2 prioritas nasional yang kami kembangkan.

Bahkan di tahun 2024 nanti, dari 7 program prioritas nasional, kami akan ambil peran untuk 4 program prioritas nasional. Yang pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan kualitas dan berkeadilan. Yang kedua adalah program prioritas nasional.

Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat..., yang ketiga adalah program prioritas nasional yang keempat, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebhuddhayaan, dan yang terakhir program prioritas ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Empat program prioritas tersebut kami jabarkan di dalam kegiatan KPK, sebagaimana program prioritas tahun 2023, yaitu SP 2022, yang kami akan sampaikan selanjutnya.

Yang kedua adalah asset *recovery*. Sebagaimana amanat di dalam undang-undang bahwa KPK harus mengembalikan asset *recovery* sebanyak-banyaknya.

Yang ketiga, KPK juga berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2014 mengembang fungsi sebagai Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Yang berikutnya, sesuai juga dengan amanat, rencana pembangunan jangka menengah nasional KPK juga mengemban fungsi dan peran sebagai pengembangan sistem penanganan perkara terintegrasi.

Yang terakhir, KPK diamanatkan untuk melakukan peningkatan integritas penyelenggara negara dan ini kita ukur dengan cara melakukan survey penilaian integritas. Di samping program prioritas tersebut, KPK juga menjalankan program unggulan KPK, di antaranya adalah PAKU (*Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas*) integritas. Yang kedua adalah desa anti korupsi. Yang ketiga adalah politik cerdas dan berintegritas. Yang keempat adalah ACFFest (*Anti Corruption film festival*) dan tahun ini kita laksanakan dengan cara, "jangan pernah menjualbelikan suara rakyat. Itu

tagline yang sudah dibuat dan disepakati. Jadi, kita sadar bahwa KPK harus mengambil peran bagaimana mewujudkan dan membebaskan partai politik dari praktek-praktek korupsi karena itu yang bisa dilakukan oleh KPK.

Yang berikutnya, kita juga mengembangkan salah satu program yang kita kedepankan, “Jelajah negeri bangun antikorupsi. Yang terakhir adalah kita mengembangkan penyuluh antikorupsi atau PAKSI API

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,

Strategi pemberantasan korupsi masih kami kedepankan tiga: satu, strategi pendidikan masyarakat, meningkat *awareness* dan kesadaran supaya tidak terjadi korupsi *preventif*, yaitu cara pencegahan, perbaikan system. Yang ketiga adalah dengan cara penindakan supaya orang takut untuk melakukan korupsi, dan yang keempat adalah KPK tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, KPK melibatkan peran serta masyarakat karena sebagaimana dalam amanat Undang-Undang 30 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang 19 2019 disebutkan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pemberantasan, mencegah melalui koordinasi supervisi, *monitoring*, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pelibatan serta masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Kami akan lewatkan untuk capaian kerja tahun 2022, kami akan masuk kepada capaian kinerja kita di tahun 2022. Dari apa yang kami lakukan, ada satu indikator yang perlu kita sampaikan, yaitu tentang indeks perilaku antikorupsi. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, indeks perlakuan korupsi menunjukkan angka peningkatan, di mana tahun 2019, 3,70; 2020 naik 3,84; dan 2021, 3,88; dan tahun 2022 yang lalu 3,93.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi, dengan salah satu alat ukur, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sampai dengan 31 Mei 2023, kewajiban lapor penyelenggaraan negara sebanyak 371.722, sudah melaporkan sebanyak 365.333, belum lapor sampai hari ini sebesar 6.389. Dengan distribusi dan penjabaran penyebarannya, antara lain, eksekutif sebesar 98,49%, legislatif 92,86%, yudikatif 99,21%, BUMN dan BUMD 99,04%.

Di bidang penindakan, di tahun 2022 KPK telah melakukan penyelidikan 113, penyidikan 120, penuntutan 133, *inkracht* 144 perkara, yang telah eksekusi sebesar 101 perkara. Tersangka di tahun 2022 sebanyak 149 orang tersangka dan telah dilakukan penahanan tahun lalu sebanyak 127 tersangka, dengan nilai *asset recovery* yang bisa diselamatkan oleh KPK sebesar 575,74 juta rupiah dan capaian ini lebih tinggi daripada target sebesar 141,7 miliar atau capaian tahun lalu mencapai 406,32%.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan bagaimana kerja-kerja KPK di dalam upaya pembebasan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Salah satunya adalah peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan keuangan daerah. Ini pun sudah kami lakukan, capaian kurang lebih 76 koma..., 76% dengan area intervensi KPK meliputi 8 area intervensi. Saya juga ingin sampaikan delapan-delapannya.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Begitu juga dengan efektivitas penyelesaian perkara yang dilakukan supervisi oleh KPK. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, 88 perkara, selesai 39 perkara, dan tahun ini kita mengambil tugas untuk penyelesaian perkara hasil supervisi sebesar 49 perkara. Dari aktivitas dan program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, pada tahun lalu kita mencapai, menyelamatkan sebesar 68,17 triliun, yaitu penyelamatan aset daerah dan aset negara.

Yang kedua adalah penyelamatan tunggakan pajak yang tertagih 7,89 triliun.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,

Sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa KPK pun diberikan mandat untuk mengelola dan membangun sistem penanganan perkara terpadu berbasis informasi.

Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,

Sistem pemerintahan pun, sebagaimana diamankan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik, sebagaimana Perpres Nomor 95 Tahun 2018, KPK telah melaksanakannya dan mendapat nilai SPB KPK sebesar 3,81, melebihi target yang diinginkan, sebesar 3,7 dengan predikat sangat baik.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Giliran kami untuk menyampaikan juga pertanggungjawaban keuangan tahun 2022, di mana KPK menerima anggaran sebesar pagu Rp1.303.673.972.000,00. Serapan realisasi sebesar Rp1.264.258.366.843,00 atau capaian realisasi sebesar 96,98%.

Selanjutnya, kami akan sampaikan program dan capaian kinerja tahun 2023. Sejak Januari sampai dengan Mei 2023, KPK telah melaksanakan seluruh program, baik program prioritas maupun program unggulan, di antaranya program pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Tahun 2023 kita sudah menyelesaikan enam partai politik daerah Aceh, dan juga partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang terbaru. Singkatnya, 26 partai politik telah mendapatkan pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Mudah-

mudahan sumbangsih KPK akan menjauhkan dan menyelamatkan seluruh anggota legislatif, kader partai, pengurus partai, terselamatkan dari praktek-praktek korupsi.

Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian kami hormati.

Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan realisasi anggaran tahun 2023. Dari anggaran tahun 2023, kami ingin sampaikan, namun sebelum itu kami sampaikan ada hal yang lebih penting, yaitu data sampai hari ini, KPK telah melakukan penyelidikan 55 berkas perkara dari target 120 perkara, telah dilakukan penyidikan sebanyak 73 perkara dari target 120 perkara, penuntutan 39 perkara, *inkracht* 67 perkara, eksekusi 62 perkara, tersangka sampai hari ini sebanyak 75 tersangka, ulangi, 73 tersangka, dan sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 sebanyak 59 perkara. Khusus bulan Juni ini kami telah melakukan penahanan sebanyak 4 orang, hari ini ada juga yang ditahan, Pak, tiga orang.

Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,

Asset recovery, Januari sampai dengan 2..., ulangi, Januari sampai dengan Mei 2023, KPK telah menyelamatkan *asset recovery* sebesar 154,10 miliar dari target 141 miliar di tahun 2023. Selanjutnya karena ada Kepala PPATK, kami juga ingin menyampaikan karena ini menjadi isu hangat pembicaraan nasional maupun media tentang tindak lanjut 33 LHA yang kami terima dari PPATK. Boleh kami sampaikan, Pak ini? Walaupun ini terkait bukan anggaran, tapi ini menjadi beban anggaran.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Dari 33 LHAPPATK yang kami terima, tindak lanjutnya sebagai berikut. Kami melakukan pemetaan terhadap LHA yang kami terima, hasilnya sebagai berikut. Pertama, ada dua LHAPPATK yang tidak terdapat di KPK ya. Yang kedua adalah proses penelaahan di Direktorat Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat dan LHKPN sebanyak 5 LHAPPATK. Tahap penyelidikan sampai hari ini berjalan sebanyak 11 LHAPPATK. Dua belas di antaranya dari 33 tersebut sudah dilakukan penyidikan dan ada juga yang dilimpahkan ke Mabes Polri 3, total semuanya 33 LKAPPATK yang kami terima dari Satgas TPPU yang dibentuk oleh Menkopolkum. Dari 33 LHAPPATK tersebut, nilai transaksi, saya harus sampaikan, nilai transaksi di dalam LHAPPATK tersebut sebesar Rp25.363.874.885.910.

Selanjutnya, kami ingin sampaikan, dari 12 LHA yang telah menjalani proses hukum, sebagai berikut. Pertama adalah AP, nilai transaksi 60 miliar, sudah tersangka; Edi Setiadi sudah terpidana; Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto sudah terpidana; Sukiman sudah terpidana; Nathan Pasomba dan Suherlan sudah terpidana; Yul Dirga sudah terpidana; Hadi Sutrisno dengan nilai Transaksi ada, Pak, itu, terpidana; Agus Susetyo sudah terpidana; Aulia Imran Maghribi, Ryan Ahmad Ronas, Veronikal Lindawati semua sudah terpidana; Yulmanizar dan Wawan Ridwan dengan nilai 3,2

triliun sudah terpidana; Alfred Simanjuntak dengan nilai transaksi 1,2 sudah terpidana.

Kami ingin sampaikan, dari 16 tersangka tersebut, dengan nilai transaksi 8,5 triliun, sudah kami tuntaskan. Jadi, kami memang tidak banyak bicara, mohon izin, Pak Budi, Johan Budi, kita tidak bicara..., kita kerja aja, Pak, karena kita kerja, memang diminta untuk kerja ya. Jadi, 33 sudah selesai, Pak, itu... (*suara tidak jelas 25:51*).

Selanjutnya, kami akan sampaikan terkait dengan anggaran ... (*suara tidak jelas 28:55*) perlu, tahun 2023 ini. Terakhir, Pak, *slide...*, *slide*, tahun 2023, dari kegiatan-kegiatan KPK, dari Januari sampai dengan Mei 2023 dengan anggaran sebesar pagu efektif 1,2 triliun sudah terealisasi serapan sebesar Rp621.229.334.600,00, serapan kita sampai hari ini sudah 51,6%.

Selanjutnya, kami akan memasuki sebagaimana agenda, yaitu rencana kinerja KPK dan Pagu Anggaran 2024.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,

KPK bekerja tunduk kepada program prioritas nasional yang kami sampaikan di awal. Dari 7 program prioritas nasional, dikerjakan oleh KPK dan merupakan tanggung jawab KPK ada empat program prioritas nasional. Dari program prioritas tersebut, kami susun ke dalam rencana strategi KPK.

Selanjutnya, kami jabarkan di dalam arah kebijakan KPK. Dari arah kebijakan tersebut kami jabarkan kembali kepada program prioritas apa yang harus dikerjakan oleh KPK. Ada lima program prioritas dan ini tetap kami pertahankan dan harus kami tuntaskan.

Selanjutnya, kami juga susun program unggulan tahun 2024. Kalau yang lalu kami membuat program unggulan ada enam. Sekarang menjadi sembilan untuk tahun 2024.

Program-program tersebut, satu, program politik cerdas berintegritas. Ini kami ingin sampaikan, Bapak-Ibu, tahun 2024 yang akan datang kita ingin mengajak seluruh anggota legislatif, calon kepala daerah dari 546 daerah, baik provinsi kota dan kabupaten, akan mengikuti pendidikan antikorupsi karena kami ingin tidak ada lagi anggota legislatif, kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan ini terilhami setelah kami bertemu dengan NCS dan CCDI, KPK-nya Republik Rakyat Tiongkok. Sepuluh tahun mereka bebaskan negaranya dari praktek-praktek korupsi.

Apa yang mereka kerjakan? Menertibkan partai politik, menertibkan penyelenggaraan negara, menertibkan BUMN. Karena itu, kami terpanggil untuk melaksanakan program-program ini dalam upaya pendidikan dan pencegahan korupsi.

Kedua, pilkada bersih dan berintegritas. Kami akan lakukan. Seluruh 546 kepala daerah, ulangi, daerah yang akan ikut pilkada, nanti kita akan

lakukan pendidikan pilkada bersih dan berintegritas. Pilih yang jujur, yang jujur dipilih dan akan terus kita kembangkan. Kita akan bagi menjadi lima wilayah pilkada bersih dan berintegritas. Itu nanti masing-masing calon kita akan kumpulkan disuatu daerah dengan 5 wilayah koordinasi..., wilayah koordinasi dan supervisi.

Yang berikutnya, PAKU integritas juga akan kita teruskan karena nanti, mohon izin, mudah-mudahan disetujui oleh Pimpinan Komisi III dan segenap Anggota Komisi III, PAKU integritas ke depan kita akan juga menyentuh kepada seluruh pejabat pemerintah, kepada seluruh calon kepala daerah, dan juga anggota legislatif terpilih di Pileg 2024. Kami tentu punya harapan akan bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di dalam kegiatan program PAKU integritas.

Selanjutnya, melanjutkan program Desa Anti Korupsi. Tahun ini kita garap 22 desa antikorupsi. Tahun depan kita garap 50 Desa Anti Korupsi. Yang berikutnya adalah program Kabupaten dan Kota Anti Korupsi. Kita ingin mewujudkan sebagai *piloting* proyek kabupaten bebas korupsi, 10 kabupaten dan kota bebas korupsi, 5 kota antikorupsi.

Selanjutnya, kita juga akan terus mengembangkan penyuluh antikorupsi dan ahli pembangunan integritas. Kita juga akan terus-menerus melaksanakan kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Yang kedelapan, kita terus akan mengembangkan juga *Anti Corruption Film Festival*. Yang kesembilan adalah program *Anti Corruption Summit*.

Dari program-program prioritas dan program unggulan, KPK membutuhkan anggaran sebesar Rp1.345.417.981.000,00. Terima kasih kepada Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III, pagu indikatif yang sudah disetujui sebesar Rp1.095.749.163.000,00. Kami sungguh berharap untuk mensukseskan seluruh program prioritas, maupun program unggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional, kami masih mohon membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp249.668.818.000,00.

Demikian yang ingin kami sampaikan. Mewakili segenap Insan KPK menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap Anggota Komisi III, segenap anak bangsa di mana pun berada mari bersatu memberantas korupsi, membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi.

Sekian terima kasih, saya akhiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om santi, santi om.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kami persilakan selanjutnya Kepala PPATK.

KEPALA PPATK (IVAN YUSTIAVANDANA):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Rahayu,
Salam kebajikan buat kita semua,

Yang kami hormati Bapak Ketua dan wakil ketua Komisi III DPR RI, seluruh Pimpinan,
Yang terhormat Para Anggota Komisi III DPR RI,
Bapak Kepala,
Bapak Ketua KPK dan jajaran, dan
Seluruh peserta rapat kerja pada siang ini,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu *wa ta'ala* karena atas rahmat dan ridho-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja pada hari ini, sebagai salah satu bentuk dedikasi, pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati.

Memenuhi undangan rapat kerja dari Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 30 Mei tahun 2023, pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan paparan terkait dengan rencana kerja anggaran PPATK tahun 2024, ya.

Berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, PPATK mendapatkan pagu indikatif sebesar 242,3 miliar yang akan digunakan untuk membiayai dua program, yaitu pertama, program dukungan manajemen sebesar 180,4 miliar yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional sebesar 168,7 miliar dan belanja nonoperasional sebesar 11,7 miliar.

Kedua, program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme sebesar 61 miliar..., 61,9 miliar Rupiah. Pagu indikatif tahun 2024 akan kami gunakan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan PPATK dalam rangka mewujudkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana strategis PPATK Tahun 2020-2024.

Rencana strategis tersebut mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu menjaga stabilitas keamanan nasional melalui penguatan sistem antikorupsi. Selain itu, PPATK berkomitmen melanjutkan program prioritas nasional, yaitu Pendidikan dan Pelatihan APU atau PPT bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan pemetaan terhadap isu-isu strategis dan kegiatan prioritas PPATK maka tema Renja PPATK Tahun Anggaran 2024 adalah optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal untuk mendukung program *green* ekonomi, kesuksesan Pemilu 2024, dan kiprah Indonesia dalam keanggotaan *financial action task force* yang saat ini sedang dalam pembahasan intensif di..., ..., di pemerintah.

Yang berfokus pada, satu, peningkatan kualitas teknologi informasi untuk mengantisipasi kemajuan *financial technology* dalam rangka penguatan APU PPT PPATK. Kedua, penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Ketiga, peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam *financial action task force*. Keempat, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kelima, peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPT..., TPPU dan TPPT, dan enam, peningkatan kapabilit..., peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan *good governance*, serta penguatan sarana dan prasarana internal.

Rincian pagu indik..., rincian Pagu Indikatif Tahun 2024 sampai dengan rincian per kegiatan tertuang pada bahan rapat yang telah kami sampaikan kepada Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat pada kesempatan ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa PPATK telah menyampaikan kebutuhan pagu indikatif tahun 2024 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas sebesar 350 miliar rupiah.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN Kepala Bappenas tahun..., Nomor B292/M/PPM/DS/PP 04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S287, tanggal 10 April 2023, Pagu Indikatif PPATK sebesar 242,3 miliar. Perlu kami sampaikan bahwa anggaran tersebut belum cukup optimal untuk mendukung keberhasilan capaian program-program prioritas PPATK.

Kami menyadari terdapat keterbatasan kemampuan APBN secara nasional. Namun demikian, mohon kiranya dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan anggaran PPATK dapat menjadi salah satu yang dapat diprioritaskan untuk dipenuhi.

Berdasarkan perhitungan kami atas kebutuhan anggaran tahun 2024, izinkan kami untuk mengajukan tambahan anggaran melalui penetapan pagu anggaran tahun 2024 yang menjadi kewenangan Bapak dan Ibu Anggota Badan Anggaran DPR RI sebesar 84,3 miliar yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar 36,4 miliar dan program pencegahan pemberantasan TPPU-TPPT sebesar 47,9 miliar.

Anggaran tersebut sangat kami perlukan untuk mendukung kinerja PPATK, antara lain, untuk kegiatan sebagai berikut, pengalaman pemilu, pengawasan pihak pelapor, tindak lanjut *mutual evolution review*, *financial action task force*, dan dukungan Satuan Tugas Komite TPPU sebesar 8,9 miliar, pemenuhan dan pembaharuan sarana dan prasarana PPATK sebesar 26,8 miliar, peningkatan infrastruktur, tata kelola keamanan TI dan penguatan SPBE sebesar 35,1 miliar.

Keempat, pengukuran efektivitas dan kualitas integritas pihak pelapor sebesar 1,9 miliar. Kelima, penguatan lembaga diklat APU PPT dan edukasi publik sebesar 1,8 miliar; dan keenam, revitalisasi budaya organisasi dan penguatan *human capital* PPATK sebesar 9,6 miliar. Rincian permintaan tambahan anggaran tahun 2024 telah kami tuangkan dalam bahan rapat yang telah kami sampaikan.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati.

PPATK senantiasa fokus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dengan penerapan pola kerja baru dan kami senantiasa berkomitmen untuk mengelola APBN secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah kami tetapkan.

Kinerja PPATK tidak terlepas dari kerjasama dan bimbingan, serta arahan dari pimpinan serta seluruh Anggota Komisi III DPR RI sehingga dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III atas segala dukungan yang telah dan selalu diberikan kepada PPATK selama ini.

Demikian, kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Ivan.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.

Kita tadi telah sama-sama mendengarkan paparan Ketua KPK, Kepala PATK yang sangat jelas dan komprehensif. Sebagaimana arahan Pimpinan, untuk sesi pertanyaan ini kita per fraksi. Jadi, sementara per fraksi dulu.

Kita mulai kiri kanan ya.

Silahkan dari Fraksi Golkar.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas seizin Pak..., Bapak Doktor Adies Kadir selaku Ketua Kapoksi saya. Pak, izin. Ibu sekretaris saya, Ibu..., Ibu Sari itu. Ini, ganti namanya jadi Ibu Farida.

Izin, Pak..., izin, Pak Ketua.

Baik.

Bismillahirrahmanirrohiim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III,
Bapak Ketua KPK dan jajaran,
Kepala PPATK dan jajaran yang sama-sama saya banggakan,**

Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Pimpinan KPK yang telah menjelaskan secara runut, rinci, dan mudah dipahami, dan terbuka cara berpikir kami dalam rangka mengalokasikan anggaran dengan jumlah kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan tadi, mulai dari upaya pemberantasan korupsi dari tingkat desa sampai kepada calon pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin legislatif, dan seterusnya. Ini adalah hal yang sangat cerdas sekali yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua KPK pada kesempatan ini.

Selanjutnya, dari pagu..., karena kita pada hari ini kita membahas pagu anggaran maka saya melihat bahwa pagu indikatif 2024 oleh KPK 1 triliun 55 miliar 95 miliar, ini turun dari indikatif tahun 2023. *Nah*, saya kira dengan turunnya pada kesempatan ini semoga dengan usulan tambahan 249 triliun nanti, ini saya tadi disampaikan oleh Pak Doktor Adies Kadir, selaku Ketua Kapoksi kami, Pak, bahwa kami menyetujui.

Kenapa kami setuju? adalah alasannya, sepanjang ini digunakan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara, membentengi tindakan-tindakan orang yang mencoba-coba untuk korupsi lalu dihalangi dengan adanya kehadiran KPK, dengan berbagai aktivitas, berbagai kreativitas, berbagai program kerjanya maka anggaran ini tidak ada keraguan baik Golkar untuk menyetujui semuanya. Mulai dari pagi indikatif yang ada maupun usulan tambahan 249 triliun ..., maaf, miliar, tambahannya ya.

Kemudian, yang kedua, saya pindah ke PPATK. Ini penjelasan PPTK singkat padat dan cepat sekali dapat dipahami.

Terima kasih, Pak Ivan, penyampaiannya. Saya kira, kalau dilihat dari anggaran 2023 adalah 292 miliar anggarannya, sekarang turun di pagu indikatif 2024 ini menjadi 242 miliar. Sebenarnya, angka ini sedikit sekali sebenarnya, dibandingkan dengan upaya kawan-kawan di PPATK ini dalam rangka melakukan tindakan, upaya dalam rangka penyelamatan keuangan negara.

Saya kira, ini tidak..., tidak ada keraguan kami juga. Permintaannya, untuk tambahan 84,3 miliar bahwa kami juga sampaikan bahwa kami juga tidak ragu untuk menyetujui segala permintaan dari PPTK ini, baik dari pagu indikatifnya maupun tambahannya, sepanjang itu memang juga dalam rangka untuk mengefektifkan, menopang semua program yang telah direncanakan oleh kawan-kawan PPTK dalam rangka bagian daripada penyelamatan keuangan negara yang akan dilakukan.

Saya kira itu, singkat juga kami sampaikan karena ini adalah pembahasan anggaran, belum pengawasan. Jadi, saya hanya berbicara soal anggaran dan kesimpulannya kami setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPK dan Kepala PPTK dengan anggaran yang disampaikan barusan ini.

Saya kira itu. Saya kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pak Supriansa.

PDIP, Pak Nurdin apa Pak JB?

F.PDI PERJUANGAN (DRS. M. NURDIN, M.M.):

Sebentar.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Nurdin, tak kasih waktu 8 menit bagi 2, 4 menit, 4 menit.

F.PDI PERJUANGAN (DRS. M. NURDIN, M.M.):

Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Rekan-rekan mitra kerja dari KPK dan PPTK dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya menyimak dengan cukup serius, Pak, mengenai masalah anggaran ini karena ini penting untuk kegiatan Bapak-Bapak semua, di samping..., dibandingkan dengan nanti keuangan negara.

Saya bisa mengerti apa yang di..., saya ke KPK dulu. Yang di hasil KPK, dari dana yang diberikan kepada KPK ternyata serapannya cukup bagus. Jadi, tahun 2022 sampai ... (*suara tidak jelas 49:423*) persen, kemudian 2023, 51%.

Walaupun masih ada beberapa hal yang masih kurang, mungkin ini perlu perbaikan dan percepatan, yang 13,1%, 43,9% dan 43,0% mohon ini bisa dipercepat dalam penyerapannya ini atau apakah salah memprogramkan atau mungkin bisa dialihkan kepada yang lain, yang lebih penting apabila sarapan ini sangat kecil.

Mengenai tambahan, dari hasil paparan yang diberikan oleh Ketua KPK bahwa untuk ke depan di 2024 ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang harus diantisipasi. PDI Perjuangan menyetujui untuk tambahan ini dan berupaya untuk bisa memperjuangkan nanti di Banggar besar, 242..., 249.668 miliar.

Kemudian, KPK, ini karena empat menit, Pak. Jadi, saya juga sama, ke Pak Ivan, mungkin saya berikan gambaran penyerapannya, Pak, yang 2022 dan 2023. Maksudnya adalah untuk bisa menjelaskan di ke Banggar besar bahwa memang bisa terserap apa yang diberikan kepada PPATK. Bahwa tambahan untuk 84,3 miliar pada prinsipnya kami menyetujui dan akan berupaya memperjuangkan di Banggar besar.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Nurdin memanfaatkan tiga menit.
Pak Johan masih ada lima menit.

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati pimpinan Komisi III dan juga Anggota Komisi III,

**Yang saya hormati Pak Ketua KPK Pak Firli dan jajaran,
Kepala PPATK Pak Ivan dan jajaran.**

Pak Firli, saya sebenarnya tertarik dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, Pak, berkaitan dengan tugas-tugas yang tadi disampaikan. Ternyata KPK sudah bergerak jauh ya, terkait dengan 349T yang kemarin itu, Pak Firli. Ini yang belum diketahui oleh publik ya.

Dalam rapat dengan Pak Mahfud MD, Menkopolkam, waktu itu, saya mengusulkan agar KPK dimasukkan di dalam tim yang dibentuk ya, untuk 349T. Kemudian belakangan saya baru tahu bahwa KPK ternyata juga melakukan proses terhadap 33 LHA. Tapi, hari ini, Pak Firli, kita bicara soal anggaran.

Saya takutnya kalau bicara soal itu ditegur oleh Pak Adies karena itu saya fokus anggaran saja, Pak Adies. Nanti kalau *ngomong* soal anggaran, saya satu menit sudah cukup, Pak, karena Pak Firli, Pak Ivan, Komisi III ini, tidak hanya 53 Anggota Komisi III, termasuk juga Sekretariat, itu berapa pun anggaran yang Bapak ajukan, pasti disetujui, Pak, karena kita paham betul apa yang menjadi tugas-tugas dari KPK dan PPATK. Menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Supriansa, itu penting demi bangsa dan negara.

Karena itu, kita *support* penuh soal anggaran ini sehingga..., apa namanya..., apa yang diajukan oleh..., baik oleh KPK maupun PPATK itu lebih e..., baik juga, yang jangan yang biasa-biasa saja, *gitu*, Pak Firli.

Kalau memang butuh, apalagi tadi tugas-tugas yang disampaikan oleh Pak Firli ya, Ketua KPK, berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, termasuk juga para caleg, baik itu DPRD maupun..., tentu itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, Pak, karena ini hasilnya itu, dipetiknyakan, tidak langsung, Pak Firli.

Itu nanti..., apa..., ketika pemahaman itu..., apa..., sudah matang, *gitu* ya, sudah..., mereka mengetahui mana *sih* yang disebut korupsi, mana yang tidak itu..., itu kan setelah dia terpilih nanti, akan menjalankan fungsi sebagai..., kalau legislatif ya. legislatif, kalau kepala daerah ya. kepala daerah. Tapi, Pak Firli, kampanye antikorupsi itu dilakukan sejak saya di KPK juga, Pak. Tapi, makin ke sini, makin banyak juga yang ditangkap KPK ya.

Jadi, ini yang salah yang mengkampanyekan atau yang salah yang dikampanyekan antikorupsi itu, kepala daerah, anggota legislatif sebenarnya dia tahu juga itu, apa yang disebut korupsi. Tapi, dia tetap melakukan itu ya. Jadi, menurut saya, terobosan-terobosan dalam konteks pencegahan lebih... apa namanya..., lebih di..., ini, Pak, lebih disesuaikan dengan zamannya, gitu ya. Menggunakan media sosial dan lain sebagainya, termasuk juga PPATK. Menurut saya PPATK ini anggaran lebih digunakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, Pak Ivan, apakah itu dari sisi peralatannya maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di PPATK.

Tadi kurang disinggung lebih detail oleh Pak Ivan ya, mungkin bagaimana kemudian pengembangan sumber daya manusia yang ada di PPATK maupun kapasitas..., apa..., *tools* atau peralatan yang dipunyai oleh PPTK. Jadi, Pak Ketua KPK tadi menjelaskan dengan detail ya. Sayang ini waktunya soal anggaran, Pak Firli.

Nanti di lain kesempatan, Pak Firli, Bapak akan saya *challenge*, Pak, mengenai tadi yang Bapak sampaikan itu. Bagaimana itu, *nah*, karena nggak boleh, Pak, kalau sekarang saya *ngomong* begitu. Nggak boleh. Nanti dimarahin Pak Adies. Jadi, anggaran, Pak Adies, saya dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui, Pak, kalau perlu ditambah, Pak, untuk KPK.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Gerindra ada?
Siapa?
Oh, Bu Rizka. silahkan.

F. P GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan serta rekan Komisi III,
Yang saya hormati Ketua KPK serta seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Bapak Kepala PPATK serta seluruh jajarannya,

Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi atas capaian kinerja tahun 2023 pada nilai *asset recovery* penanganan KPK sebesar 154 miliar rupiah. Adapun dua poin yang ingin saya perdalam terkait pagu anggaran KPK 2024, di mana diantaranya yang pertama pada usulan tambahan anggaran pencegahan dan monitoring, saya selaku Komisi III Fraksi dari Gerindra mendukung penuh usulan tambahan anggaran sebesar 315 miliar karena bidang ini adalah poin penting di mana KPK akan berpegang teguh pada prinsipnya terhadap pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Lalu, yang kedua, terkait bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, realisasi anggaran di tahun 2022 sebesar 61 miliar atau sekitar 94% dari target capaian 2022. Saya lihat di sini penjabarannya, KPK bekerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, ada 85 perguruan tinggi negeri dan PTKIN serta pimpinan perguruan tinggi yang

berkomitmen untuk memperkuat integritas ekosistem melalui penguatan 12 area perbaikan.

Namun, di sini, Pak, saya tidak melihat adanya program unggulan terkait hal itu. Menurut saya, program ini sangat penting dikarenakan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa mendapat pendidikan secara dua arah dengan KPK. Dengan adanya program ini masyarakat menjadi kritis dan benar-benar menjadi ilmu baru sejak dini karena terkadang masyarakat ini ingin terjun ke dunia politik, namun terganjal kurangnya pendidikan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Saya mohon untuk usul ini dijadikan bahan dasar pertimbangan untuk dijadikan usulan tambahan anggaran di bidang pendidikan, serta masyarakat selain desa antikorupsi dan sosialisasi anti korupsi pada aparatur negara.

Lalu, untuk PPATK, saya memperdalam dua hal, Pak, Kepala PPATK. Yang pertama, pada *point* rencana kerja dan anggaran PPATK tahun 2024 pada program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, khususnya pengelolaan teknologi informasi PPATK.

Saya mendukung penuh seluruh program terkait anggaran ini, Pak, untuk dapat menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dan diperoleh oleh PPATK untuk menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi di Indonesia.

Lalu, yang kedua, terkait rencana kerja dan anggaran tahun 2024 poin program perencanaan dan keuangan PPATK, alokasi anggaran program dukungan manajemen ini hampir 70% ada di sini, Pak, dibandingkan dengan pengawasan internal PPATK yang hanya 300 juta. Saya harap alokasi anggaran ini sudah tepat tujuannya dan saya ingin memberi usul alokasi anggaran untuk pengawasan internal PPATK juga dapat ditambahkan untuk bisa menjadi komitmen PPATK yang professional, baik dari penanganan masalah dan juga dukungan manajemen internal PPATK.

Mungkin demikian, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

P3 ada? Nggak ada,
PAN?
Tidak ada.
PKS?

F-PKS (H.M. NASIR DJAMIL, M.Si.):

Baik, terima kasih, Ketua.

Saya Nasir Jamil 410 daerah pemilihan Aceh.

**Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Firli dan juga PPATK beserta
seluruh para deputy dan jajaran yang pada hadir pada rapat pada siang
hari ini,**

Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan sekaligus apresiasi karena laporan yang disampaikan oleh KPK, terutama, itu sangat *clear* ya, hampir tidak ada yang lupa dari apa yang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu, kami berharap agar serapan untuk tahun 2023, mudah-mudahan di akhir tahun itu bisa mencapai ya 97 atau 98% karena tahun lalu 96%.

Yang kedua, terkait dengan pagu indikatif 2024, di mana KPK masih membutuhkan anggaran tambahan sekitar 200 sekian miliar rupiah. *Nah*, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan terkait dengan usulan tambahan itu, kami juga berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pengembalian aset Bahwa di sini dicatat tanggal..., apa..., di halaman 18 terkait dengan penetapan status penggunaan dan hibah dan juga sudah disampaikan di sini ada sejumlah kementerian dan lembaga yang menerima itu dan juga ada pemerintah kabupaten.

Nah, harapan saya, mungkin ke depan Badan Narkotika Nasional barangkali juga perlu mendapatkan perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya, terkait dengan..., katakanlah mungkin barangkali penetapan status penggunaan dan hibah ini. Kalau memang itu memungkinkan karena situasi BNN itu "memprihatinkan", baik sarana dan prasarana.

Padahal, negara hari ini menghadapi bukan hanya darurat korupsi, tapi juga darurat narkoba. Barangkali ada pertimbangan dari Pimpinan KPK, bagaimana kemudian BNN di samping mendapatkan penguatan oleh pemerintah dalam hal ini negara, KPK juga barangkali ikut membantu BNN karena saya pikir ini juga problem serius di negara ini. Tentu saja masih ada lembaga-lembaga lain yang barangkali mendapat pertimbangan oleh KPK untuk diberikan..., apa namanya..., aset atau apalah namanya..., yang itu dalam bentuk hibah.

Yang kedua, ini menyangkut dengan belanja tambahan. Kami tentu saja memberikan dukungan kepada KPK karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan bahwa kita ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Nah, karena itu, usulan tambahan ini, Pimpinan, tentu harus kita perjuangkan agar kemudian KPK bisa memenuhi tugas dan fungsinya. Karena itu, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan tambahan anggaran, misalnya soal di halaman 50 ya, soal kampanye antikorupsi untuk dukungan pemilu, ya.

Seperti apa sebenarnya yang mau kita..., yang mau diisukan, narasi apa yang kira-kira mau disampaikan oleh KPK dalam konteks kampanye

antikorupsi untuk dukungan pemilu ya. Sebab mau tidak mau memang kami harus mengakui bahwa partai politik juga mengalami hal ini ya dan itu jejak rekam digitalnya bisa dilacak oleh siapa pun begitu.

Nah, sehingga narasi seperti apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh KPK terkait dengan kampanye antikorupsi ini ya. Kemudian juga *piloting* pembentukan desa, kabupaten kota antikorupsi. *Nah*, barangkali kepada kami juga perludipikirkan, perlu disinergikan terkait dengan daerah pemilihan Anggota Komisi III ya, terkait program *piloting* pembentukan desa, kabupaten kota dan antikorupsi ini. Meskipun sekali lagi ini soal anggaran, tapi paling tidak dari awal kami sudah sampaikan hal itu.

Kemudian, di halaman 51 misalnya, usulan tambahan anggaran juga akan diperuntukkan biaya pelaksanaan mutasi pegawai KPK ke IKN. Jadi, karena tidak ada *breakdown*nya, kita tidak tahu berapa banyak pegawai yang akan dipindahkan ke atau dimutasi ke IKN ya, bahagian mana saja yang akan dimutasi ke PKN dan lain sebagainya.

Kemudian, juga soal kegiatan pelaksanaan litigasi dan bantuan hukum serta perlindungan saksi sebab di sini juga ada disebut dengan mantan pimpinan, Pak Firli. Jadi, halaman 51, bantuan atau bantuan hukum ini juga diperuntukkan untuk pimpinan atau mantan pimpinan. Siapa yang dimaksud dengan mantan pimpinan tersebut?

Kemudian juga di halaman 52 ya, soal kegiatan layanan hubungan masyarakat, kemudian juga layanan umum terkait operasional penyelenggaraan kegiatan KPK, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin ya, menyampaikan usul juga kepada KPK terkait usulan tambahan anggaran pengadaan bus antikorupsi sebesar 5 miliar. Saya pikir, berharap agar bus ini bisa efektif, Pak Firli, ya, menyampaikan pesan-pesannya. Tentu saja sebenarnya, ya, kalau dipikir-pikir, lapisan masyarakat lapisan bawah juga mereka kadang masih awam soal ini, sebab mereka nggak punya kekuasaan, Pak, ya karena karena biasanya yang punya kekuasaan seperti kita-kita ini yang punya potensi untuk melakukan ini.

Dan yang terakhir, terkait dengan pengadaan bus antikorupsi barangkali saya menyarankan agar KPK bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan otobid ya, ya, yang besar, untuk menempelkan di dinding-dinding mereka itu, seruan-seruan, slogan-slogan antikorupsi di samping memang KPK sendiri mengadakan atau mengadakan bus, bus antikorupsi mungkin ada baiknya, kalau kemudian perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi itu bisa diajak untuk kita tempelkan dan mereka berjalan dari satu provinsi, dari satu kabupaten kota ke kota lainnya.

Demikian, Ketua, pada prinsipnya Fraksi PKS memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK terkait dengan Pagu indikatif 2024 dan juga usulan tambahan anggaran untuk tahun 2024 dan itu harapan kami seperti yang diharapkan oleh Pak Firli tadi.

PPATK, tentu saja kita masih bergelut dengan isu-isu beberapa waktu lalu dan tentu saja kami berharap agar isu-isu itu tidak lepas dari pengamatan dan kerja dari PPATK sebab kadang isu itu besar kemudian menjadi kempis dan hilang sama sekali. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan penjelasan dari PPATK terkait dengan isu-isu kekinian ya, menyangkut dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu terutama apa yang disampaikan oleh Bareskrim beberapa waktu lalu bahwa dana-dana dari perdagangan narkoba ya, itu kemudian dicuci untuk kegiatan-kegiatan politik dan lain sebagainya. Kita tidak tahu politik apa yang dimaksud, tapi paling tidak kita sudah bisa memahami soal itu.

Terima kasih sekali lagi, Ketua, atas kesempatan kepada Fraksi PKS.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Selanjutnya Nasdem.

F. P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Makasih, Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ini walaupun saya agak *ketutup* pandangan dengan Ketua KPK, tapi nggak papa.

Nggak, nggak, nggak.

KETUA RAPAT:

Maju depan, maju depan. Maju depan, ini *Iho*, depan sini *Iho*. Depan. Biar dekat, maju depan sini.

F. P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Saya itu nggak pernah minta Pak JB pindah. Kenapa pindah *Iho*. *Iho*. Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi III,

Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua KPK dan seluruh jajaran, Kepala PPATK beserta seluruh jajaran yang hadir,

Yang pertama, tentu saya terima kasih Pak Johan Budi bergeser, tapi sebetulnya saya tidak bermaksud begitu, Pak Johan.

Nah, kalau komunikasi begini, kan, lebih..., lebih enak, gitu.

Pak, yang berikutnya adalah, Ketua KPK, karena ini adalah rapat anggaran maka tentu saya jadi teringat laporan Ketua KPK di rapat yang lalu tentang penyerapan anggaran yang sedemikian tinggi, yang saya apresiasi, mohon itu dipertahankan dan mungkin juga bisa ditingkatkan kembali dan saya yakin itu bisa terwujud.

Yang kedua, Pak Firli, jangankan untuk minta tambahan anggaran, andaikan ini bisa memungkinkan pemerintah ini memberikan tambahan lebih dari apa yang Pak Firli minta, saya mungkin pertama kali yang akan mendukung itu karena beban, tanggung jawab ya, ya, ya Pak JB sudah duluan dari saya. Ya, beban..., beban, tanggung jawab, dan harapan masyarakat terhadap KPK setiap..., sedemikian tinggi dan itu harus sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh KPK sebagai lembaga yang memang kita semua berharap ini bisa bekerja dengan efektif.

Lagi-lagi, Pak Firli, saya ingin menyampaikan bahwa anggaran untuk pencegahan, hampir setiap dalam rapat kerja saya sampaikan, anggaran untuk pencegahan tolong ini ditingkatkan dan diperkuat kembali.

Selanjutnya, kepada Kepala PPATK. Saya mengapresiasi tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan bahwa dalam keterbatasan anggaran yang ada, Pak Ivan senantiasa berinovasi dan mengoptimalkan anggaran yang ada dengan tidak mengurangi kualitas kinerjanya PPATK dan dalam kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi atas kerja kerasnya PPATK sehingga mendapatkan jalur *fast track* untuk mencapai status keanggotaan *finansial action task force* dan ini tentu tidak mudah sehingga saya berharap, dalam kepemimpinan Pak Ivan ini PPATK berhasil mendapatkan keanggotaan itu.

Untuk itu, kepada, baik PPATK maupun KPK saya, Poksi Nasdem, dan saat ini juga sebagai Kapoksi Nasdem saya mendukung penuh untuk usulan tambahan anggaran kedua lembaga ini.

Terima kasih. *Wallahumuafiq illa aqwamintoriq.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

PKB.

F-PKB (HERU WIDODO):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III dan seluruh rekan-rekan Anggota Komisi III,

Yang saya hormati Pak Firli, Ketua KPK, beserta seluruh jajaran,

Yang saya hormati Pak Ivan, Kepala PPATK, beserta seluruh jajaran.

Pertama, tentu saya ingin menyampaikan terima kasih atas paparan yang disampaikan terkait anggaran karena kita bisa pahami dengan sangat jelas, berikut dengan penambahan anggarannya. Tapi, saya kira, saya perlu menyampaikan beberapa hal.

Ini yang pertama adalah KPK. Saya rasa saya masih ingat sekali ketika Pak Firli menyampaikan bahwa KPK akan mengedepankan pencegahan dibandingkan penindakan sebab penindakan ini bahasanya adalah jalan terakhir, kira-kira begitu. Tapi, kalau saya melihat anggarannya, justru di pencegahan kenapa kecil sekali, Pak. *Malah*, kalau kita *pengennya* fokus dalam hal pencegahan maka tentunya yang harus diperbesar, Pak, digenjut. Saya kira begitu.

Contoh, misalnya ya, Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, ini hanya 29 miliar. Lalu, kemudian, Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring 315 juta. Ini kecil sekali bagi saya.

Nah, kalau menurut saya, kalau memang fokus KPK adalah ingin... apa namanya..., mengedepankan pencegahan maka tentu ini yang harus diperkuat dan saya kira pendidikan anti korupsi ini menjadi suatu hal yang efektif atas usaha pencegahan korupsi dan saya kira ini bisa diperbanyak lagi, Pak.

Kalau Pak Ketua, kemudian misalnya agak kesulitan menentukan titiknya, kita teman-teman Komisi III pasti juga akan membantu itu karena teman-teman Komisi III ini juga mereka punya basis, mereka punya konstituen yang kemudian bisa memberikan penjelasan atas program kerja yang ingin dicapai oleh KPK.

Lalu, kemudian, PPATK juga sama. PPATK pagu indikatifnya hanya 242 miliar. Kemudian ada penambahan 84,3 miliar menjadi 320,7 miliar. Saya kira sama sebetulnya. Kalau memang kita fokusnya adalah dalam hal pencegahan maka pendidikan pencegahannya itu yang harus diperbanyak atau program-program pencegahan atas tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya itu harus perbanyak.

Saya kira, Pak Firli, Pak Ketua KPK, dengan usulan pagu indikatif 1,09 triliun, kemudian ada tambahan 249 miliar, saya kira ini menjadi angka yang sebetulnya kalau saya pribadi sebetulnya masih kurang, Pak, karena kalau kita mengedepankan pencegahan tentunya program bidang pencegahan

harus diperbesar lagi. Saya kira mencegah ini lebih baik daripada mengobati karena kalau mencegah itu bisa menghindari dari rasa sakit, tapi kalau mengobati belum tentu bisa sembuh Pak.

Jadi, saya kira itu saya. Atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan sepenuh hati dan tanpa ragu akan mendukung apa yang menjadi usulan anggaran dari KPK dan PPATK selama itu adalah dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Silahkan, terakhir Demokrat

F-PD (DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrohmanirohim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Yang terhormat Ketua KPK beserta jajarannya,
Kepala BPK beserta jajarannya.**

Kami Fraksi Demokrat tentu mengapresiasi apa tadi yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh KPK maupun PPATK karena saya pikir menyusun anggaran, ke depan ini juga harus didasarkan kepada capaian-capaian dan pengelolaan anggaran periode sebelumnya. Kami tadi cukup jelas mendengar evaluasi-evaluasi yang disampaikan oleh KPK maupun PPATK sehingga desain untuk menyusun anggaran ke depan itu lebih terukur begitu dan ini, alhamdulillah ini bisa meng-*guidens* pembahasan anggaran kita ke depan.

Nah, kepada KPK, tentu saya ingin menyampaikan, untuk pertama kalinya, bahwa jika kita melihat besaran anggaran di tahun 2024, khususnya pagu indikatif dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 ini agak turun, *gitu* ya. Turunnya itu mungkin sekitar 14%, *gitu*.

Nah, saya khawatir bahwa penurunan anggaran ini kemudian akan mempengaruhi kinerja KPK karena kita tahu *core business*-nya KPK, yaitu salah satunya di garda terdepan adalah pemberantasan korupsi yang di dalamnya ada pencegahan dan penindakan perkara korupsi itu sendiri.

Nah, sementara itu, kita juga harus melihat kondisi faktualnya bahwa di tahun 2024 ini tentu kita masih dibayang-bayangi adanya perilaku korupsi yang nyata-nyata, jika kita kemudian agak *set back* atau mundur ke belakang, di tahun 2022 transparansi internasional, yaitu mengeluarkan indeks persepsi korupsi, di mana Indonesia itu menempati peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34, dan memang salah satunya adalah indikasi peringkat Indonesia ini juga di..., dipersepsikan karena adanya korupsi di sistem politik kita.

Sistem politik kita ini, tadi kalau mendengarkan apa yang disampaikan Pak Firli, tentu ini juga *in line* dengan apa yang dilakukan oleh KPK ini. Tapi, Pak Firli, bahwa yang saya pahami bahwa korupsi yang disampaikan transparansi internasional di sistem politik ini bukan hanya kemudian sistem politik di partai politik saja, tapi ini juga melingkupi bagaimana kemudian di tingkat eksekutif, sebagai pelaksana sebuah kebijakan, sebagai pelaksana undang-undang ini juga masih juga menjadi sumber karena penggunaan anggaran, pelaksanaan anggaran ini juga ada yang terbesar adalah di eksekutif dan salah satunya suap mengenai perizinan, itu juga masih, Pak, *gitu*.

Apalagi jika kita kemudian coba kita kerucutkan kepada..., khususnya sumber daya alam kita, begitu, mineral, gas, tambang atau dalam perspektif *illegal things* yang lain, ini juga cukup besar itu faktor korupsi atau gratifikasi atau suapnya. Tentu bukan hanya kemudian kampanye politik dalam perspektif politik praktis di dalam partai, tapi juga harus diterjemahkan kepada sistem politik yang lebih besar, kepada sistem ketatanegaraan atau pemerintahan juga yang besar karena ini juga bagaimanapun juga menjadi sumbernya, *gitu*.

Nah, kemudian, juga yang harus juga menjadi perhatian kita selain tadi, masyarakat transparansi yang kita..., yang saya sampaikan tadi bahwa jika kemudian kita melihat ini ada penjabaran tentang renstra KPK sendiri untuk tahun 2024 ini ada empat target capaian yang telah ditetapkan, *gitu*, dan kemudian di dalam konteks renstra 2020-2024 ini kami juga memahami, dari empat itu ada yang pencapaiannya sudah ada tiga, Pak, *gitu*, Ada satu yang mungkin yang menjadi fokus kita, *gitu*.

Nah, dalam hal ini, tentu kami dari Demokrat mencatat, *gitu* ya, ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian kita semuanya, termasuk KPK, yaitu terkait dengan itu tadi, target Indeks Perilaku anti Korupsi atau IPAK tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 4,06, sementara ini realisasinya kami melihat kurang sedikit lagi, Pak, 3,93. *Nah*, ini tentu menjadi perhatian kita. Dan, kedua, yaitu target persentase *asset recovery* di tahun 2022 itu tetapkan sebesar 70%, kalau tidak salah, dan realisasinya sebesar 61,74%, kalau tidak salah ini. *Nah*, artinya apa, Pak?

Kami ingin memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK dengan melihat jumlah anggarannya tadi yang kemudian menurun, Pak, *gitu*. Tentu dengan tanda kutip, *gitu*, beban-beban yang masih harus dihadapi KPK ke depan ini, kami tidak ingin bahwa target-

target yang sudah ditetapkan, kemudian kondisi-kondisi *actual* terkait dengan pemberantasan korupsi ini tidak tertangani secara optimal, begitu.

Nah, untuk itu, Fraksi Demokrat secara prinsip menyetujui dan mendukung sepenuhnya, Pak, apa yang diusulkan KPK ini. ...karena pun jika usulan Bapak itu disetujui, ditambah pagu indikatif, masih juga lebih rendah dibanding alokasi anggaran 2023. *Nah*, artinya sesungguhnya secara *political will* kami ingin memperkuat kinerja KPK dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi atau *good and clean governance* itu dari..., untuk KPK.

Kemudian. saya ingin lebih lanjut ke PPATK. *Nah*, dalam konteks penganggaran PPATK *nih*, kami mencatat juga ada beberapa isu strategis di tahun 2024 ini, di mana yang kami pahami, Pak, di tahun 2024 ini adalah merupakan tahun terakhir implementasi rencana strategis PPATK yang di mana rencana strategis ini dituangkan di dalam peraturan Kepala PPATK, juga di tahun 2020, *gitu* ya, dan kami juga membaca Peraturan Kepala PPATK ini, kemudian menjabarkan target indikator kinerja utama, *gitu*, dan tujuh indikator kinerja strategisnya, *gitu*.

Nah, dalam pemahaman kami bahwa dari renstra yang ditetapkan itu, capaian PPATK hampir semuanya mayoritas indikator kinerjanya tercapai. Namun, kami mencatat, Pak, ada satu target yang belum tercapai, yaitu *financial integrity index*, *gitu*.

Nah, *financial integrity index* ini yang kami baca pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 64%, namun realisasinya enam koma dua puluh..., 6,28, *gitu* ya. Dari 6,4 yang ditetapkan, baru 6,28, *gitu*. *Nah*, harapan kami tentu karena ini tahun 2024 ini adalah implementasi terakhir dari renstra itu, harapan kita, PPATK juga bisa..., bisa memenuhi kekurangan di *financial integrity index* ini karena ini juga penting terkait dengan kinerja PPATK di dalam mengemban tugasnya.

Nah, kemudian, menginjak kepada anggaran, kami ingin mendapatkan Penjelasan, Pak, karena ini di dalam penjelasan Bapak, di halaman 25 ini terkait dengan pengelolaan..., mohon maaf,,,,, sebelum ke 25, saya ke-19 dulu, yaitu terkait dengan pengelolaan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan kemitraan PPATK.

Ya, ini cukup mengejutkan juga, *gitu* ya, jika kemudian KPK..., eee PPATK melakukan hasil analisis kemudian direkomendasikan kepada kementerian/lembaga, *gitu*. Setelah membaca apa yang Bapak sampaikan, ini masih perlu edukasi-edukasi yang khusus kepada institusi mitra PPATK ini karena ternyata jika membaca dari laporan dari PPATK ini juga belum optimal tindak lanjut dari apa..., analisa ataupun laporan dari PPATK ini sehingga tidak heran jika selama ini tindak lanjut dari temuan-temuan dari PPATK ini kemudian tindak lanjutnya agak-agak tersendat atau belum optimal.

Alhamdulillah, tadi KPK sudah menyampaikan kepada kita, yang direkomendasikan ataupun yang disampaikan KPK sudah jalan. *Nah*, untuk itu, Pak, ini menjadi penting, *gitu*, jangan sampai kemudian isu ini menjadi

fenomena timbunan masalah yang kemudian ada di institusi tertentu yang kemarin itu, alhamdulillah dibuka kepada kita semuanya, kepada publik bahwa di lingkungan Kementerian Keuangan sebetulnya besar, *gitu* ya.

Nah, itu..., itu yang cukup mengejutkan. Saya tidak heran, jika mendengar laporan PPATK sendiri karena ternyata perbedaan persepsi, perbedaan paradigma, kapasitas kompetensi untuk menanggapi laporan itu masih ada *gap*, *gitu*. Nah, ini saya pikir perlu, Pak, ditingkatkan ini kalau..., kalau memang ini menjadi *handicap* atau kendala. Daripada menjadi isu yang tidak berkepanjangan, kan, lebih baik seperti yang dilakukan KPK, menerima laporan kemudian ditindaklanjuti, *gitu*. Tapi, yang penting, Pak Firli, bahwa laporan itu disampaikan kepada public, biar publik juga juga mengetahuinya.

Kemudian, yang kedua, PPATK, *nih* yang juga yang terakhir, yaitu kami melihat memang pentingnya *update* teknologi di era informasi teknologi yang sedemikian cepat, *gitu*. *Nah*, kami melihat bahwa ini ada di tahun 2023 juga ada pengalokasian anggaran yang relatif besar jika dibanding yang lain, termasuk juga di 2024 ini juga pengelolaan teknologi informasi.

Yang ingin saya mohon penjelasan...

KETU RAPAT:

Waktu tinggal dua menit.

F-PD (F-PD (DIDIK MUKRIANTO):

Iya, yang ingin saya mohonkan penjelasan, Pak, apakah memang informasi teknologi baik *hardware* atau *software* itu sudah paripurna di PPATK ataukah ada pengadaan baru? Kalau ini sifatnya *update* atau penyesuaian, ya, kami bisa memahami itu.

Itu mungkin mohon dijelaskan saja dan secara prinsip kami dari Fraksi Demokrat sangat mendukung dan *menyetujui* usulan tambahan yang disampaikan oleh KPK maupun PPATK.

Terima kasih, *akhiru kalam, bilahitaufik wal hidayah*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETU RAPAT:

Terima kasih.

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Kita telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas apa yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Ketua KPK dan Kepala PPATK. Selanjutnya, kami persilakan Ketua KPK terlebih, nanti dilanjutkan Kepala PPATK untuk merespon apa yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan Komisi III.

Ini kurang 10 menit lagi jam 16. Jadi, sekaligus diperpanjang saja 30 menit, dari jam 16.00. Jadi, kita akhiri nanti pukul 16.30.

Silahkan, Pak Firli.

KETUA KPK:

Terima kasih Pimpinan Komisi III DPR RI dan Anggota Komisi III DPR RI,

Perkenankan saya untuk memberikan respon atas beberapa tanggapan dan pertanyaan ataupun pernyataan. Yang pertama adalah kami menyampaikan apresiasi atas pernyataan Anggota Komisi III yang mendukung atas tambahan anggaran KPK.

Mewakili insan KPK, KPK mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa respon. Yang pertama, tadi ada yang sangat saya sudahantisipasi sebenarnya, Pak Nurdin, dari Fraksi Partai PDIP, tentang serapan 13% tadi. Itu memang sebelum saya ke sini itu sudah saya tanyakan, Pak.

Memang di Kedeputan Koordinasi dan Supervisi, itu empat bulan ini menyusun dan mengumpulkan data terkait dengan bagaimana hasil SPI, sistem survei penilaian integritas. Kenapa itu menjadi penting? karena penilaian integritas ini terkait dengan program pencegahan korupsi di delapan area pencegahan, yaitu *monitoring centre for prevention (MCP)*. Ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian sehingga kita pakai program prioritas, daerah mana yang harus kita sentuh, sehingga SPI-nya bisa naik. Ituyang pertama.

Yang kedua, kita juga melihat ada kerentanan terjadi korupsi di beberapa daerah dari sistem tata kelola keuangan maupun sistem tata pemerintahan. Beberapa waktu lalu kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, gubernur, dan walikota dan dihadiri juga oleh aparat pengawas, baik itu BPKP maupun BPK, termasuk juga Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dari Kementerian Negri itu sudah kami sampaikan, Pak.

Nah, ke depan, ada empat program yang harus dikerjakan oleh Kedeputan Korsup sehingga nanti kami harapkan dan kita targetkan serapan anggaran akan meningkat, tetapi bukan habis-habisan uang, bukan. Pertama adalah melakukan koordinasi terkait dengan bagaimana tata kelolaan daerah dan observasi pemanfaatan aset daerah. Itu sudah kita, Pak.

Kita kumpulkan dari 546 daerah. Daerah mana saja, pemerintah daerah yang punya sengketa terkait dengan aset daerah, baik itu BUMN maupun BUMD. Ini sudah karena tahun lalu kita bisa selamatkan kurang lebih 68,1 triliun dan daerah mana juga yang pajaknya rendah karena tahun lalu kita bisa selamatkan pemulihan pajak kurang lebih 7,8 triliun. Jadi, ini yang dikerjakan oleh KPK, Pak.

Yang berikutnya, kita juga masih punya tunggakan perkara yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum, di mana tahun lalu perkara supervisi KPK 88 dan sudah kita selesaikan 39. *Carry over* untuk perkara tidak berkorupsi yang harus diselesaikan, yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai perkara yang disupervisi sebagaimana mandat PP 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi sehingga ada 40 perkara yang harus diselesaikan tahun ini.

Yang berikutnya, kita juga masih memiliki tugas, yaitu pelaksanaan kesepakatan dengan pimpinan Komisi III terkait dengan peningkatan kerjasama, sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah, sebagaimana kesepakatan rapat pada tanggal 9 Februari 2003 yang lalu. Jadi, kami yakin, Pak, serapan anggaran bisa mencapai target.

Yang berikutnya, tadi disampaikan oleh Pak Johan Budi ini juga. Kami memang melihat bagaimana program pendidikan antikorupsi ini bisa mencapai hasil yang efektif dan tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna. Karena itu, program-program pendidikan anti korupsi sudah kami pastikan harus tepat sasaran.

Terkait dengan itu juga, kita sudah menggunakan *instrument tools* untuk media sosialisasi dan kampanye. Boleh nanti kalau anda ada waktu kita putarkan film, salah satunya adalah iklan. Iklan layanan publik KPK, yang cerita pendeknya adalah jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan hal yang benar dan iklan itu sudah bisa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian tonton kalau naik pesawat Garuda. Bukan..., bukan..., bukan apa ya, bukan *marketing* ini, bukan, tapi kalau Bapak-Ibu lihat pasti ada. Klik saja di film ACFFEST (*Anti-Corruption Film Festival*) yang ada di pesawat Garuda. "Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Di situ salah satu contoh.

Yang berikutnya...

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Baru hanya di Garuda ya?

KETUA KPK:

Iya, Pak?

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Hanya di Garuda?

KETUA KPK:

Kita bekerja sama dengan BUMN, Pak, karena iklan itu bayar seharusnya, Pak. Ya, kita belum ada sarana untuk membayar iklan. Nanti kalau saya mintakan iklan, tambah lagi anggarannya.

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Nah, ini. Interupsi, Pimpinan.

Melalui Pak Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT:

Nah, ini yang benar.

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Menyambung tadi Pak Firli, sepertinya film ini efektif, Pak..., Pak Firli. Dulu juga pernah ada yang dikeluarkan oleh KPK, film ya....

KETUA KPK:

Siap.

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Tentang antikorupsi. Mungkin itu bisa juga selain iklan tadi....

KETUA KPK:

Siap.

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Saya kira bisa juga dibuat film-film pendek

KETUA KPK:

Siap.

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Yang berkaitan sama antikorupsi itu, Pak. Itu tuh apa..., menyentuh sampai ke..., ini, Pak, ke pikiran masyarakat, kalau yang nonton ya. Saya kira itu perlu diperbanyak, Pak. Kalau perlu anggaran tambah, ya, tambah *aja*, Pak Firli.

KETUA KPK:

Baik.

F.PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO):

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA KPK:

Yang kedua, jangkauan sampai hari ini untuk alat komunikasi, yaitu TVRI, di situ juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa lihat, "Suara rakyat tidak boleh diperjualbelikan". Itu ada, Pak, ya, ditempel di warung, di jembatan, di pembantu, di depan tempat parkir itu ada, semuanya menolak.

Kenapa? karena kami menyadari ini penting. Banyak orang paham tentang ini sering terjadi kerawanan, tapi kita tidak berbuat. Sekarang kita berbuat dan tahun ini ACFFest kita, *Anti Corruption Film Festival* temanya adalah jangan jual beli suara ya karena memang *vox populi vox dei*. Kalau kita pahami bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, tentulah kita akan tidak pernah menjualbelikan suara Tuhan.

Bapak-Ibu sekalian, terima kasih.

Yang berikutnya, tadi juga ada terkait dengan pendidikan masyarakat yang disampaikan oleh Ibu Siti Nuriska Puteri Jaya terkait dengan.... Kalau kita bicara tentang strategi pendidikan masyarakat maka sasaran utama adalah jejaring pendidikan. Bicara tentang jejaring pendidikan itu, baik formal maupun informal, baik itu lembaga pendidikannya sendiri, baik itu juga termasuk dengan penggiat antikorupsi di kampus-kampus, yang kita sebut dengan *Anti-Corruption Summit*. Itu kita gelorakan dan kita juga mengajak perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk membuat pusat-pusat kajian antikorupsi. Beberapa waktu lalu kami sudah buka dengan forum rektor karena kami ajak seluruh rektor untuk berbicara supaya tidak terjadi korupsi, terutama di dunia pendidikan.

Bapak-Ibusekalian.

Kami sangat prihatin dengan adanya perkara Direktur Unila. ...karena apa yang terjadi. Pak, kalau terjadi korupsi, suap menyuap mau masuk mahasiswa maka perampasan hak asasi, manusia itu terjadi. Yang seharusnya lulus menjadi tidak lulus, yang tidak boleh lulus menjadi lulus. Itulah kita ajak para forum rektor.

Selanjutnya, kalau tadi ada dari Fraksi PKS terkait dengan laporan *clear*, memang kami sampaikan bahwa, Bapak-Ibu sekalian, kami mohon maaf, itu mungkin saja berlebihan karena apa yang kami sampaikan itulah yang kami miliki. Kami tidak bisa lebih daripada itu. Tapi, yang pasti masih banyak yang harus dikerjakan oleh KPK.

Apalagi tadi Pak Nasir Jamil menyangkut tentang program-program yang terkait dengan Desa Anti Korupsi, Kabupaten/Kota Anti Korupsi ini memang masih keterbatasan. Tapi, kalau seandainya nanti ada kemungkinan dibuka tambahan karena ini belum *final*, kita akan coba juga untuk menyasar kabupaten kota dan desa di mana kira-kira yang memang pantas untuk kita jadikan Desa Anti Korupsi, Kabupaten Anti Korupsi dan Kota Anti Korupsi.

Berikutnya, tadi ada juga yang menanyakan tentang kebutuhan mutasi pegawai. Kami sampaikan dalam forum ini, pegawai KPK akan bergeser ke IKN, kurang lebih sekitar 211 orang dan di dalam Undang-Undang 19 /2019 dan juga Undang-Undang 30/2022 yang telah diubah dengan undang-undang 19/ 2019 disebutkan bahwa komisi pemberantasan korupsi berkedudukan di Ibu kota negara. Jadi, kami harus mengawasi, walaupun baru ya, 20% yang kita pindahkan ke IKN. Tapi, pelaksana undang-undang, pelaksanaan mandat undang-undang, KPK berada di..., kedudukan di ibu kota negara, kita harus laksanakan. Jadi, ada 211 orang.

Tadi juga terkait dengan dukungan pemilu, tadi ada juga yang menyampaikan. Sebenarnya ini bukan dukung proses pemilu, bukan. Tapi, kita ingin bahwa peserta pemilu, penyelenggara pemilu tidak terlibat tindak pidana korupsi, baik menggunakan program pilkada terintegritas maupun program politik cerdas dan berintegritas. Pilih yang jujur, yang jujur dipilih. Karena itu, harus kita laksanakan di tahun 2024, khususnya bagi anggota legislatif, para pasangan calon yang akan ikut kontestan di Pilkada di 2024 nanti, semua kita akan sentuh dan kita sasar untuk menjadi memiliki rasa keprihatinan, *awareness*, hati-hati, termasuk juga mendapatkan imun supaya tidak terjadi korupsi.

Bapak-Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati,

Tadi ada juga terkait dengan anggaran pengadaan barang-barang jasa, belanja modal berupa..., atau disebut dengan pengadaan bus, saya harus sampaikan. Saat ini kita memang memiliki satu unit bus dan usianya sudah lebih dari 8 tahun. Tapi, alhamdulillah sampai hari ini masih bisa operasi. Tahun ini satu unit bus “jelajah negeri bangun budaya antikorupsi” akan menyasar tahap semester pertama wilayah Jabodetabek dan Bandung. Semester kedua nanti kita akan menyasar ke Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan kampungnya Pak Nasir Jamil, Aceh.

F-PKS (H.M. NASIR DJAMIL, M.Si.):

Izin, Ketua, memang tahun 2024, diprediksikan Aceh daerah termiskin juga, Pak.

KETUA KPK:

Kami lanjutkan, yang selanjutnya, kami juga menyampaikan bahwa kalau tadi ada yang menanyakan kenapa program..., kelihatannya program pencegahan lebih rendah daripada penindakan. Namun, sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa pemberantasan korupsi, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dalam Undang-Undang 19/2019 disebutkan, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan, pemberantasan, dan pencegahan korupsi meliputi.

Nah, karena itu, ingin kami sampaikan, sesungguhnya program pencegahan itu lebih besar dananya daripada tindakan. Tercatat, program pendidikan masyarakat 91,5 miliar, pencegahan itu sendiri 60,5 miliar, koordinasi dan supervisi itu 40,78 miliar. Kenapa program koordinasi dan supervisi dimasukkan juga dalam upaya pencegahan karena sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan koordinasi itu diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang 19/2019 yang antara lain disebutkan, satu, menyusun tata kelola, bagaimana sistem pencegahan korupsi.

Yang kedua adalah melakukan upaya-upaya membangun sistem pelaporan anti korupsi. Yang ketiga adalah meminta laporan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tentang upaya-upaya pencegahan korupsi. Yang keempat adalah KPK melakukan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang memberantas korupsi sehingga total biaya anggaran di bidang pencegahan sebesar Rp192.872.995.000,00. Ini baru saya hitung. Saya hitung barusan. Belum ada jawaban ini.

Itu pencegahan, sedangkan penindakan 97,507. Ulangi Rp97.573.161.000,00. Tadi kalau tidak salah yang menyampaikan dari Fraksi PKB ya, Pak, ya.

Yang selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan rencana penganggaran yang kami sampaikan. Tentulah rencana penganggaran ini untuk tahun 2024, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan juga kami sesuaikan dengan rencana kinerja pemerintah tahun 2024, dan juga dilandasi kepada program prioritas nasional, ada 7 program prioritas nasional yang dikumandangkan oleh pemerintah. Empat di antaranya dikerjakan oleh KPK,

Di samping itu, dalam menyusun anggaran, kami berbasis kepada apa yang terjadi lalu, *last*, yang sudah dilakukan tahun 2022. Apa yang sedang dilakukan di tahun 2023. Apa yang belum tercapai di tahun 2022 dan 2023 maka kita proyeksi prediksi program yang harus dikerjakan di tahun 2024 dan anggaran yang dibutuhkan. Itulah basis kami menyusun anggaran.

Yang kedua, mungkin tadi ada juga yang menyampaikan terkait dengan CPI. CPI kita memang 34 koma..., 34, menduduki 102 dari 180 negara. Perlu kami ingin sampaikan bahwa nilai CPI itu diatur, dilakukan berdasarkan basis penilaian sembilan aspek penilaian.

Kalau kita lihat dari 9 aspek penilaian itu, ada 3 yang nilainya konstan, ada 3 nilainya turun, dan ada juga 3 nilainya naik, tetapi ada satu nilai yang paling menjulang tinggi naik. Tapi, sayangnya, nilai yang begitu melesat naik itu tidak digunakan sebagai penilaian. Misalnya nomor 7, *world economic forum executive opinion survey* tiap tahun itu melakukan terjadinya peringkat; 2019, 46; 2020, 46; 2021, 53, tetapi sayangnya itu tidak dipakai penilaian. Sementara yang dipakai adalah yang *stuck*, bahkan yang turun.

Dari sembilan aspek ini, yang menjadi perhatian kita adalah ada tiga hal, yang berpengaruh terhadap penilaian terhadap *corruption perception index*, apa itu? Yang pertama adalah kalau kita baca uraian di dalam nilai CPI itu, satu, politik; dua; pelayanan publik; tiga; penegakan hukum. Tiga hal ini yang menjadi perhatian kita untuk bisa meningkatkan nilai *corruption perception index*.

Dari tiga itu, kalau kita dalam, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan juga, di bidang politik, kita lihat dan kita temukan di dalam *paper*-nya disebutkan adalah di bidang politik transparansinya, demokrasi indeksya turun.

Yang kedua, di bidang legislatif masih ada dan terdapat peran ganda. Di samping itu di bidang politik dan pelayanan public, termasuk pengadaan barang jasa masih terjadi yang kita kenal dengan *trading influence*, perdagangan pengaruh. Tapi, kita tidak boleh berkecil hati, tetaplah kita bersemangat.

Karena itu, program KPK tahun 2024 menysar kepada bidang politik, di bidang pelayanan *public*, di bidang penegak hukum yang kita kenal dengan lima fokus area, baik itu tata niaga dan bisnis, tata kelola keuangan, perwujudan aparatur pemerintah, khususnya penegak hukum, pelayanan publik, dan juga kegiatan politik. Dengan jabaran program politik cerdas berintegritas, survei integritas partai politik, dan sistem integritas partai politik, PAKU integritas, dan juga kita kedepankan Stranos PK, strategi nasional pencegahan korupsi.

Kami tadi tidak singgung, tapi kalau seandainya mau disinggung, ini kami akan sampaikan nanti di akhir.

Terima kasih juga tadi disampaikan bahwa target *asset recovery*. Di dalam renstra 2022, RKP 2022, sesuai dengan kesepakatan dengan Bappenas bahwa *asset recovery* mencapai 70% target, tapi realisasinya 61%. Maknanya apa? Maknanya adalah dari beberapa perkara yang telah dieksekusi, tetapi secara kualitas jumlah *asset recovery* lebih besar daripada target karena target ditetapkan oleh pemerintah bahwa *asset recovery* tahun 2022 hanya 141 miliar, tapi realisasi kita mencapai 575,4 miliar. Artinya, capaian 406% daripada target.

**Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati,
Pimpinan Komisi III yang saya hormati,
segenap Anggota Komisi III,
Bapak-Ibu yang saya cintai dan saya banggakan,**

Demikianlah yang ingin kami respon atas beberapa pertanyaan tadi. Kami mohon maaf apabila penjelasan kami dirasakan kurang sempurna. Kami mohon maaf karena itu adalah keterbatasan kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pimpinan Komisi III.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Ketua KPK.

Selanjutnya, kami persilakan Saudara Kepala PPATK.

KETUA PPATK:

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Insyah Allah penjelasan kami akan jauh lebih singkat sedikit, berbanding lurus dengan jumlah anggaran dibandingkan dengan KPK. Jadi, pagu yang Beliau usulkan adalah total pagu kami, gitu ya, penambahan beliau adalah total pagu indikatif kami dalam satu tahun. Tapi, terima kasih sekali lagi, kami sangat merasa terhormat dan bangga menjadi bagian dari pengawasan, Komisi III khususnya, karena sepanjang saya berkarya di PPATK rasanya Komisi III tidak pernah tidak mendukung, tidak pernah tidak menyetujui, dan bahkan tidak pernah..., mendorong penambahan dan seterusnya hal yang positif bagi PPATK. Alhamdulillah PPATK bisa terus berkarya bagi NKRI hingga saat ini.

Ada beberapa yang..., apa..., yang krusial yang mungkin bisa kami jelaskan secara sangat singkat. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan secara keseluruhan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Komisi III, Pimpinan, dan Anggota semua mendukung kami.

Lalu, kemudian, Pak Nurdin ya, di tahun 2022, *alhamdulillah* kami mendapatkan dua ratus..., pagu anggaran yang bisa kami serap itu 99,09%. Jadi, hanya tersisa sekian ratus. Lalu, di tahun ini, 2023, saat ini kami sudah sudah menghabiskan 61% anggaran dan alhamdulillah juga di tahun lalu kami sudah mendapatkan tambahan 75 miliar untuk kami pergunakan sesuai dengan program yang juga sudah disetujui oleh Bapak dan Ibu-Ibu di Komisi III.

Lalu, kemudian, Pak Johan Budi dan Bapak Nasir Jamil tadi, kami tetap fokus terkait dengan isu-isu yang sedang hangat. Bisa kami sampaikan, seperti yang Ibu Eva sampaikan tadi, sekarang PPATK dan beberapa lembaga terkait sedang berjuang untuk menjadi anggota *finansial action task force* dan insyallah tanggal 19-20 nanti akan ada keputusan.

Tapi, tetap kita masih mengantisipasi keputusan keanggotaan penuh Indonesia di *carry over* ke Oktober karena ada beberapa isu yang masih harus kita negosiasikan dengan sembilan kontak grup, yang terdiri dari beberapa negara yang menjadi..., katakanlah menjadi pembimbing kita. Tapi, sekali lagi, Pak Nasir Jamil, kami tidak menafikan isu-isu yang sekarang sedang..., apa..., sedang kita bahas dan diberitakan oleh Komisi III juga untuk di..., terkait dengan satgas.

Kemarin satgas baru melaporkan hasil progress terakhir terkait dengan tindak lanjut isu-isu yang sudah kita sepakati.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK tadi, kita juga ada forum bilateral dengan KPK mendiskusikan terkait dengan 33 kasus yang..., yang sudah kita serahkan kepada KPK dalam beberapa waktu sebelumnya.

Dan, terkait dengan Ibu Riska, terima kasih sekali lagi, usulan Ibu akan kami pedomani dan memang apabila kita..., apabila kita melihat terkait dengan..., apa..., alokasi anggaran ya, kita sadar bahwa alokasi manajemen lebih dari 70% dan memang..., apa..., kegiatan seperti analisis, kegiatan seperti proses kepatuhan itu seringkali merupakan kegiatan yang basisnya IT. Jadi, begitu IT-nya dipenuhi, itu tidak setiap kegiatan harus berbayar. Tidak setiap kegiatan harus menggunakan alokasi anggaran sehingga memang terkesan, *loh, kok*, banyak.

Di sisi manajemennya, itu lebih kepada karena pembayaran gaji pegawai, kemudian pengadaan pegawai. Kita baru juga dapat apa bantuan tambahan..., apa..., pegawai dari Kementerian Keuangan. Alhamdulillah itu memperkuat kinerja PPATK.

Lalu, sekali lagi, Ibu Eva, yang paling krusial terkait dengan keanggota..., apa..., keanggotaan di..., apa..., di FATF (*Financial Action Task Force*) itu ada beberapa isu, seperti misalnya perampasan asset. Itu masih dipertanyakan oleh seluruh anggota..., seberapa kuat perumpasan aset kita, lalu kemudian seberapa banyak muncul *evaluation...*, apa..., mohon maaf, eh..., apa..., legal asisten dengan negara lain.

Nah, itu yang masih harus kita *defense*, harus kita berikan fakta-fakta *evidence*-nya kepada seluruh anggota sehingga..., kita berharap..., kita semua mendapatkan..., apa..., bukti-bukti tambahan, misalnya dipertanyakan mengenai hasil *recovery* dalam kasus Jiwasraya. Seluruh anggota mengatakan bahwa kasus jiwassraya ada aset yang dilarikan ke luar negeri.

Nah, pertanyaannya, berapa yang sudah dikembalikan? *Nah*, itu harus kita buktikan. Itu masih berproses di Kumhamnya, berproses di Kejaksaan. Hal-hal seperti itu yang masih kita perjuangkan dari sisi Indonesia. Tapi, sekali lagi, alhamdulillah..., apa..., Ibu menyampaikan bahwa harapannya di era kepemimpinan kami semua di sini dan Era Ibu sebagai Anggota Komisi III, Indonesia menjadi FATF dan insya Allah kita janjikan itu, Ibu. Insya Allah, itu kerja besar luar biasa.

Lalu, kemudian, terkait dengan..., apa..., capaian-capaian, ya, kita tetap fokusterkait dengan pencegahan, jadi beberapa..., apa... teman-teman memang berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada..., tidak hanya kepada aparat penegak hukum, ya, juga kepada pihak pelapor, kepada masyarakat, dan kita punya program PPATK mengajar..., apa..., *meng-encourage* kalangan-kalangan muda untuk paham mengenai bahaya tindak pidana pencucian uang dan dampaknya ke depan, dan kita memang fokus terkait dengan upaya pencegahan.

...dan Bapak dan Ibu-Ibu, seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah pahami dan sangat pahami bahwa memang terkait dengan tindak lanjut HA dan HP bervariasi di antara 1 APH dengan APH lainnya. Itu memang banyak..., apa..., banyak latar belakangnya dan kita terus berkoordinasi secara bilateral, trilateral, tergantung sifat kasusnya untuk bagaimana tindak lanjut tadi, *repor...*, apa... sukses rate-nya ditingkatkan.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, Pimpinan. Tapi, sekali lagi, apabila dibutuhkan jawaban tertulis akan kami eee, dengan senang hati akan kami siapkan dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan selama ini.

Inshaallah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan kita semua selalu sehat eee dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Kita telah mendengarkan penjelasan dan jawaban dari KPK dan PPATK atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan Anggota Komisi III DPR RI.

Selanjutnya, kita membacakan kesimpulan rapat. Kami persilakan yang terhormat Pak Pangeran untuk membacakan kesimpulan rapat.

WAKIL KETUA F-PAN (IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M):

Terima kasih, Pimpinan.

Kesimpulan;

1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.095.749.163.000,00 dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp249.668.818.000,00 sehingga menjadi sebesar satu..., Rp1.345.417.981.000,00.

KETUA RAPAT:

Ya, terhadap point 1, rekan-rekan Komisi III, setuju?

Pak Ketua KPK, setuju?

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya, point 2.

WAKIL KETUA F-PAN (IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M):

2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program PPATK sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp242.325.421.000,00 dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp84.383.423.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp326.708.844.000,00.

KETUA RAPAT:

Kawan-kawan Komisi III setuju?
Kepala PPATK?

KEPALA PPATK:

Setuju, sangat setuju.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Dengan telah dibacakannya kesimpulan rapat maka selesai sudah rangkaian acara rapat kerja kita dari siang hari sampai dengan sore hari ini. Dari hasil pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2024 ini kami akan sampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis untuk disinkronisasikan. Insya Allah kami Komisi III akan memperjuangkan apa yang Bapak usulkan.

Bapak-Ibu,

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi III, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua KPK beserta jajaran, Kepala PPTK beserta jajaran, dan rapat bisa terselenggara dengan baik pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam terselenggaranya acara rapat kita dari pagi hingga siang, sore hari ini. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbilalamin*, rapat kami nyatakan ditutup, *Allahummafik illah akwa mintarik*.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PKL. 16.30 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001